

KETERKAITAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DENGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI KELURAHAN KANGKUNG KOTA BANDARLAMPUNG

Nur Hidayati, Husna Tiara Putri

Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan,
Institut Teknologi Sumatera (ITERA)

Email : nr.hidayati@yahoo.com

ABSTRACT

Due to the rapid growth of population that caused the emergence of a slum in Bandarlampung. According to the decree of the mayor of Bandarlampung number: 974/IV. 32/2014 On the determination of housing and slum location in the city of Bandarlampung that Kangkung village is a seedy village in the city of Bandarlampung. This is due to low in the provision of environmental infrastructure. It is encouraged by the condition of the community characteristic also affects the provision of environmental infrastructure. In achieving the research objectives are to know the characteristics of slum characteristic with the provision of environmental infrastructure then it is needed a descriptive statistical analysis, spatial analysis and analysis of cross-tabulation that The entire analysis is mix Methode. The majority of community work in Kelurahan Kangkung is labour with income that is still under the UMK of the city of Bandarlampung. This is reinforced with the condition of buildings that are partially still non-permanent with the capacity of a family member ≤ 5 people who are the status of their own homes. In the provision of infrastructure, the focus of the problem is wastewater, drainage, waste and fire protection. The problem is because there are limited land and the cost of the community. In addition, the association of community characteristics such as income and home building conditions that affect the environmental infrastructure provision problems.

Keywords: society, slums, infrastructure

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya urbanisasi. urbanisasi tersebut membawa dampak yaitu mengenai kebutuhan tempat tinggal yang meningkat. Akan tetapi adanya peningkatan permintaan lahan yang tidak diimbangi dengan jumlah penduduk maka terjadi keterbatasan lahan yang menyebabkan tingginya harga lahan khususnya di perkotaan dan membuat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati lahan tidak sesuai peruntukannya dan munculah permukiman kumuh.

Meningkatnya jumlah penduduk membuat permasalahan perkotaan semakin kompleks sehingga tingkat pelayanan infrastruktur masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Infrastruktur sebagai sesuatu hal yang fundamental bagi kehidupan manusia dan dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat perlu penanganan yang serius dalam keterbatasan penyediaan yang terjadi.

Seperti kota-kota lain di Indonesia, di Bandarlampung juga bermunculan permukiman kumuh di sela-sela perkotaan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan

(SK) Walikota Bandarlampung Nomor: 974/IV.32/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandarlampung bahwa dari 26 kelurahan di Kota Bandarlampung bahwa Kelurahan Kungkung merupakan kelurahan yang paling kumuh dengan tingkat kepadatan mencapai 47,238 jiwa/km².

Kelurahan Kungkung terletak di daerah pesisir Teluk Lampung yang menjadi pusat aktivitas pertumbuhan ekonomi ikan tangkap baik itu industri kecil maupun industri besar di Kota Bandarlampung. Tidak heran apabila banyak masyarakat menempati Kelurahan Kungkung disamping memanfaatkan sumber daya laut juga sumber daya darat. Dari bertambahnya jumlah penduduk di Kelurahan Kungkung maka permintaan dalam penyediaan infrastruktur lingkungan untuk menunjang aktivitas masyarakat mengalami peningkatan. Akan tetapi penyediaan yang sudah dilakukan belum memenuhi secara menyeluruh di setiap RT sehingga keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur lingkungan tersebut terjadi.

Selain dari rendahnya penyediaan infrastruktur lingkungan, karakteristik permukiman kumuh juga menjadi salah satu terjadinya kekumuhan yang terjadi sehingga dapat menggambarkan infrastruktur yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pedoman Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2016 bahwa ada berbagai indikator untuk mengetahui tingkat kekumuhan infrastruktur dasar lingkungan seperti jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran. permasalahan dasar lingkungan di Kelurahan Kungkung seperti masiuhnya budaya masyarakat membuang sampah ke laut yang menyebabkan dampak negatif ke lingkungan sekitar sehingga permukiman tersebut terkesan kumuh.

Dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan penelitian untuk *mengidentifikasi Keterkaitan Karakteristik*

Permukiman Kumuh Dengan Penyediaan Infrastruktur Lingkungan di Kelurahan Kungkung Bandarlampung. Pada penelitian ini akan dihasilkan hasil rekomendasi untuk Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandarlampung ataupun Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan penyediaan infrastruktur lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Kungkung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah “Adanya keterkaitan karakteristik permukiman kumuh dengan ketersediaan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Kungkung”. Untuk memfokuskan permasalahan maka ditarik beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana kondisi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kungkung?
2. Bagaimana kondisi penyediaan infrastruktur lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Kungkung?
3. Bagaimana keterkaitan antara karakteristik permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Kungkung?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan karakteristik permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Kungkung. Maka dibutuhkan beberapa sasaran untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Kungkung
2. Mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kungkung
3. Mengidentifikasi keterkaitan karakteristik permukiman kumuh dengan ketersediaan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Kungkung.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini berada di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandarlampung. Penelitian ini memfokuskan kepada RT yang terindikasi memiliki kekumuhan berdasarkan data *Neighborhood Upgrading Action Plan* (NUAP) yaitu Lingkungan I (RT 03 & 04), Lingkungan II (RT 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 dan 14), Lingkungan III (RT 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah.

Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi ini juga dibatasi dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam penelitian antara lain :

- a. **Sasaran 1** : kondisi fisik (kondisi bangunan, status kepemilikan rumah, jumlah anggota keluarga per rumah), sosial (pekerjaan) dan ekonomi (penghasilan).
- b. **Sasaran 2** : jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran.
- c. **Sasaran 3** : keterkaitan sasaran 1 dan sasaran 2.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Metode pengumpulan data

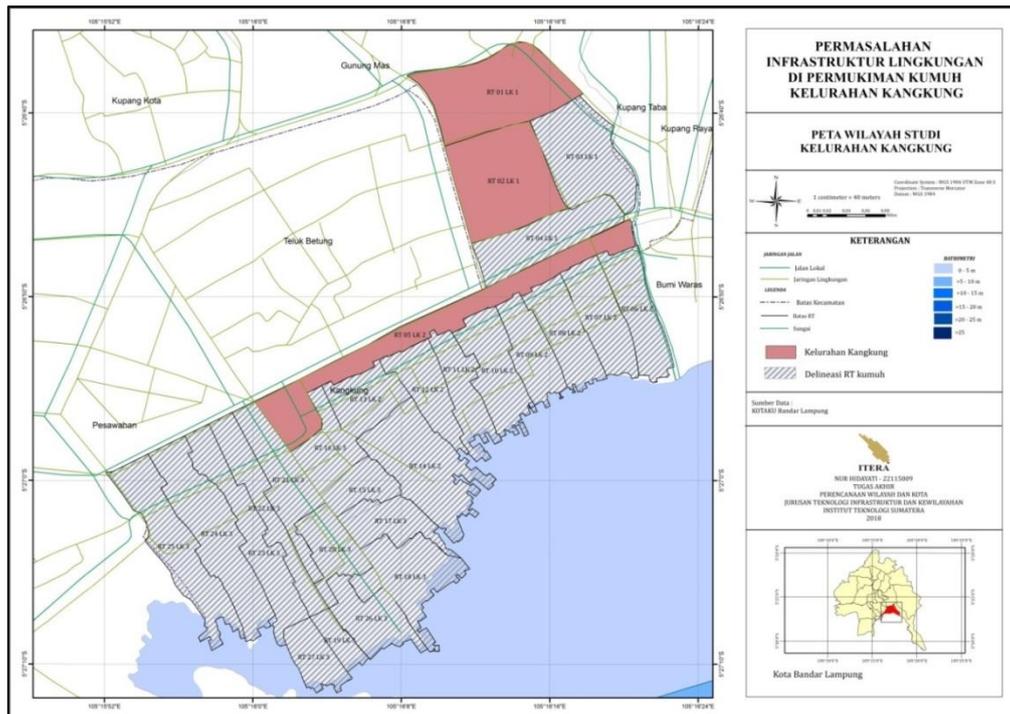
Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan cara penyebaran kuesioner dan kegiatan observasi.

b. Metode penentuan sampel

Adanya keterbatasan tenaga, biaya dan waktu maka penelitian ini menggunakan sampel KK dari jumlah KK di Permukiman Kumuh Kelurahan Kangkung yaitu 2.896 KK. Dari rumus slovin yang digunakan dengan eror 7% maka dihasilkan sampel 191 KK. Selain itu penyebaran kuesioner dilakukan dengan metode *simple random sampling* dimana dilakukan cara pengambilan sampel ini melalui cara acak angka yaitu angka 5 (lima) untuk setiap rumah.

c. Metode analisis data

- Sasaran 1 : analisis statistik deskriptif dengan aplikasi SPSS.
- Sasaran 2 : analisis deskriptif dengan penjabaran perbandingan kondisi infrastruktur lingkungan secara eksisting dengan SPM. Selanjutnya dilakukan analisis spasial untuk memetakan lokasi permasalahan penyediaan infrastruktur lingkungan per RT.
- Sasaran 3 : analisis tabulasi silang untuk mengetahui keterkaitan hubungan antara karakteristik permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur lingkungan.



Sumber : Hasil peneliti, 2019

GAMBAR 1.1
PETA DELINEASI PENELITIAN RT KUMUH

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Permukiman Kumuh

Menurut UU No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Selain itu menurut (Budiharjo, 1997), permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Gambaran lingkungan/permukiman kumuh, (Komarudin, 1997) adalah sebagai berikut:

- Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan,
- Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,
- Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan,
- Hunian bersifat sementara dan dibangun diatas tanah bukan milik penghuni,
- Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,
- Prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan)
- Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan)
- Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal
- Pendidikan masyarakat rendah.

2.2 Infrastruktur

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, infrastruktur adalah utilitas umum yaitu kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, seperti jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan pemadam kebakaran. Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Direktorat Jenderal Ciptan Karya Kementerian Pekerjaan Umum, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam infrastruktur fisik, antara lain:

- Jalan

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 534 Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, bahwa ideal panjang jalan lingkungan adalah 40-60 m/ha dan dengan tingkat pelayanan kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam. Klasifikasi fisik kondisi jalan (Riasya Nursyahbani, 2015) yaitu kondisi jalan baik yaitu apabila lebar telah sesuai standar permukiman dan sudah mengalami perkerasan jalan dan kondisi buruk yaitu apabila lebar jalan belum sesuai standar dan belum mengalami perkerasan jalan.

- Air Bersih

Penyediaan air minum dapat terbagi ke dalam dua bentuk yaitu perpipaan (PDAM) maupun non perpipaan (sumur galian atau sumur bor) ataupun setempat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/PER/IX/1990 bahwa syarat secara fisik air bersih yaitu tidak keruh, tidak berbau dan tidak berasa.

- Air Limbah

Pengelolaan air limbah pada penelitian ini ditunjukkan untuk rumah tangga dalam bentuk *black water*. Diperlukan komponen penunjang air limbah yaitu *septic tank* sebagai wadah untuk menguraikan tinja manusia. *Septic tank* ini mempunyai jarak >10 meter dari sumur bor dan 1,5 meter dari bangunan toilet. Menurut SNI 03-2398-2002 perlu dilakukan pengurasan *septic tank* setiap 3 tahun sekali dari penghuni 5 jiwa.

- Drainase

Menurut (Kementerian Pekerjaan Umum, 2011) fungsi utama drainase adalah mengalirkan air hujan yang jatuh pada permukaan tanah dan atap bangunan langsung ke sungai dan dialirkan ke hilir secepatnya, sehingga daerah hilir semakin sering terkena banjir. Menurut PerMen PU No.12 tahun 2014 bahwa ukuran saluran drainase tidak dapat distandarisasikan sebab tergantung dari:

- a) Luas Daerah Tangkapan air (DTA) dan Dpsal (Daerah Pengaliran Saluran)
- b) Periode ulang
- c) Bentuk Daerah Tangkapan air/DTA/Dpsal.

- Persampahan

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi di kehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ini juga mudah membusuk dan ada pula yang tidak membusuk. Berdasarkan kebijakan pemerintahan bentuk pengolahan ditujukan untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya dalam hal ini adalah rumah tangga, sehingga saat ini bentuk pengolahan yang didorong berbentuk 3R yaitu *Reduce-Reuse-Recycle*.

2.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

TABEL I.1
STANDAR PELAYANAN MINIMAL INFRASTRUKTUR
LINGKUNGAN PERMUKIMAN

No	Bidang Pelayanan	Cakupan Pelayanan	Tingkat Pelayanan
1	Jalan	lebar 2-5 m	Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam
2	Air Bersih (rumah tangga)	Setiap 1 jiwa membutuhkan 60 liter/hari	Tersedia layanan pipa PDAM

No	Bidang Pelayanan	Cakupan Pelayanan	Tingkat Pelayanan
3	Air Limbah (rumah tangga)	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap satu rumah membutuhkan satu kakus b) Terdapat satu MCK umum untuk melayani 25 KK c) Tersedianya sistem air limbah yang memadai 	sarana sanitasi individual dan komunal : toilet RT/Jamban/MCK dan septic tank
4	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> a) Saluran primer/makro drainase untuk kawasan strategis seperti perdagangan, industri, permukiman, untuk penanganan >10 ha, b) Saluran sekunder untuk penanganan genangan >10 Ha. c) Saluran Tersier, untuk penanganan genangan <10 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Tidak terjadi lagi genangan banjir bila terjadi genangan; tinggi genangan rata rata <30 cm, lama genangan < 2jam. b) Frekuensi kejadian banjir <2 kali setahun
5	Persampahan (rumah tangga)	<ul style="list-style-type: none"> a) Timbulan sampah perorang yaitu 2,9 liter/hari atau 11,6liter/KK. b) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. c) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> a) unit bak sampah melayani 40 liter/150KK b) satu unit gerobak sampah melayani 100 /200 KK c) satu unit kontainer melayani 8.000 I/1.000 KK
6	Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a) Setiap wilayah kabupaten/kota tersedia air untuk pemadam kebakaran b) Dibutuhkan akses <15 menit menuju lokasi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a) Hidran kota pada jarak 200 m ditepi jalan berupa tandon air (kolam, air mancur, sungai, reservoir dsb) b) Akses bagi pemadam kebakaran untuk lingkungan permukiman c) Satu pos kebakaran/90.000 jiwa d) 2 mobil kapasitas 4.000 lt/pos jaga e) Satu orang satlakar/1.000 penduduk

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 534/KPTS/M/2001. Permukiman dan Prasarana Wilayah. ,2014. & PerMen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2014

ANALISIS

3.1 Karakteristik Permukiman Kumuh Kelurahan Kangkung

Menurut Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai bahwa jarak aman rumah ke pantai minimal 300 meter. Hal tersebut untuk menghindari adanya fenomena alam yang terjadi dan juga melestarikan lingkungan laut dari aktivitas manusia yang mencemarinya. Rumah yang berdiri diatas laut merupakan rumah ilegal yang kapan saja dapat digusur oleh pemerintah daerah. Sebelumnya Kota Bandar Lampung sudah menyiapkan rumah susun khusus masyarakat nelayan di Jalan Sinar

Mulyo Keteguhan Teluk Betung Timur. Masyarakat mulai berpindah untuk menempati rumah susun tersebut sesuai dengan aturan pemerintah daerah, sehingga pesisir pantai teluk tersebut bersih dari rumah warga. Akan tetapi beberapa tahun kemudian masyarakat kembali menempati pinggir laut tersebut untuk dibangun rumah karena kedekatan dengan tempat kerja sebagai nelayan dan buruh nelayan. Sehingga sampai sekarang tumbuh rumah-rumah sampai menjadi sebuah RT di Kelurahan Kangkung.

Ada dua jenis golongan bangunan rumah yaitu permanen dan non permanen. RT 27 memiliki kondisi 100% bangunan rumah non permanen diatas laut.

Dikarenakan keterbatasan lahan, maka masyarakat mendirikan rumah secara ilegal di pinggir laut karena dekat dengan tempat kerja mereka dan ketidakmampuan masyarakat untuk mendirikan rumah layak huni karena penghasilan yang masih minim. Diketahui bahwa UMK Kota Bandar Lampung adalah Rp 2.263.390. Sebagian besar penghasilan masyarakat cukup rendah karena masih berada dibawah UMK Bandarlampung. Adapun RT yang memiliki penghasilan melebihi UMK ada empat RT yaitu RT 04, RT 19, RT 25 dan RT 27.

Selain itu masyarakat yang membangun rumah diatas laut merupakan pemekaran dari masyarakat di RT tersebut yang sebelumnya tinggal dalam satu rumah bersama orang tua sebelum berkeluarga. Mayoritas status kepemilikan rumah di Kelurahan Kangkung adalah rumah milik sendiri dengan membayar PBB setiap tahun. Sedangkan untuk status lahan yang ditempati masyarakat, rumah yang merupakan tanah hasil timbunan sampah merupakan tanah milik negara. Kondisi rumah di Kelurahan Kangkung sangat padat bangunan. Hal tersebut karena banyaknya jumlah penduduk yang tinggal tanpa dibarengi oleh ketersediaan lahan. Akibatnya jarak antar rumah hampir sangat kecil bahkan ada yang berjarak 0 m. Hal tersebut tidaklah baik karena setiap antar rumah wajib memiliki jarak dengan alasan rumah yang berderet rapat beresiko terjadi rambatan api pada rumah sebelahnya apabila terjadi kebakaran. Meskipun luasan lahan terbatas, rumah tetap diberi jarak antar bangunan untuk keamanan dan kenyamanan.

Selain pembangunan rumah non permanen diatas laut, hal yang mendorong adanya permukiman kumuh adalah masalah jumlah anggota keluarga dalam satu rumah yang tidak sesuai standar. Apabila diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat orang, luas minimal rumah sederhana berdasarkan simulasi kenyamanan gerak yaitu $47,56 \text{ m}^2$ atau $11,89 \text{ m}^2$ per jiwa (Permukiman, Pusat Litbang, 2010). Menurut (Kipraswil, 2002) bahwa luas lantai per jiwa minimal $7,2 \text{ jiwa/m}^2$ dengan unit

rumah $28,8 \text{ m}^2$ dan luas lahan 60 m^2 . Jadi perumahan di permukiman kumuh Kelurahan Kangkung tidak memenuhi standar luas lantai per jiwa dalam rumah sederhana. Hal tersebut karena dalam satu rumah rata-rata terdiri dari 3-6 orang dengan ukuran rumah 36 m^2 .

3.2 Permasalahan Dalam Penyediaan Infrastruktur Lingkungan di Permukiman Kumuh Kelurahan Kangkung

Permasalahan infrastruktur perlu penanganan lebih lanjut untuk mengurangi kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Kangkung. Permasalahan pada infrastruktur jalan lingkungan adalah lebar jalan belum sesuai dengan SPM yang sebagian besar berukuran 1,5 meter. Hal tersebut dikarenakan padatnya bangunan rumah warga sehingga keterbatasan lahan terjadi untuk menyediakan jalan dengan lebar sesuai standar berlaku. Akibat dari hal tersebut, jalan lingkungan hanya dapat dilalui oleh satu motor secara bergantian dan karena jalan sudah menempel di teras rumah warga dan dinding rumah warga.

Pada infrastruktur air bersih, mayoritas masyarakat menggunakan sumber air bersih PDAM. Akan tetapi air PDAM di Kelurahan Kangkung hanya berfungsi sebagai air bersih karena tidak dapat digunakan sebagai air minum. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan standar pipa untuk mendistribusikan kualitas air minum PDAM sehingga steril air minum menurun kualitasnya. Dikarenakan pipa yang sesuai standar mahal dan masyarakat belum mampu menyediakannya karena pemerintah hanya mensubsidikan terlayani air PDAM tanpa pemasangannya. Setiap RT tidak memiliki kran umum karena semua masyarakat saat ini sudah terlayani air bersih dengan baik.

Pada infrastruktur air limbah, masih minimnya ketersediaan WC pribadi karena beberapa masyarakat memiliki keterbatasan biaya untuk menyediakan WC umum beserta *septic tank* dan perawatannya. Selain itu keterbatasan luas rumah yang dimiliki juga

menjadi alasan masyarakat memilih buang air besar di WC umum laut. Kondisi WC umum tidak layak pakai karena non permanen di laut dan terletak bersebelahan dengan pembuangan sampah sehingga dapat menjadikan sumber penyakit. Pada infrastruktur drainase, masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembersihan drainase sehingga masih terjadi genangan saat hujan karena drainase mampet.

Pada infrastruktur persampahan, minimnya penghasilan masyarakat sehingga membuat masyarakat membuang sampah ke

laut karena gratis dan dekat dengan letak rumah warga. Keterbatasan untuk membayar karena masyarakat memprioritaskan kebutuhan sehari-hari mereka sehingga mengesampingkan kebersihan dan kesehatan mereka dengan dipenuhi sampah pada sudut jalan. Sementara itu, pada infrastruktur proteksi kebakaran masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti tempat tinggal sehingga tidak ada hidran dan mobil air karena masyarakat memiliki keterbatasan lahan akibat semakin tingginya jumlah penduduk.

3.3 Keterkaitan Karakteristik Permukiman Kumuh dengan Penyediaan Infrastruktur Lingkungan di Kelurahan Kungkung

TABEL I.2
KESIMPULAN HUBUNGAN KARAKTERISTIK
PERMUKIMAN KUMUH DENGAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI
KELURAHAN KANGKUNG

Sub Variabel	Karakteristik Permukiman Kumuh	Pearson Chi-Square	Chi-Square Tabel	Cramer's V	Keterangan
Kondisi Fisik Bangunan					
Letak bangunan rumah	Pekerjaan	13,882	9,488	0,270	Ada keterkaitan
Jarak antar rumah	Kondisi bangunan rumah	9,891	5,9914	0,228	Ada keterkaitan
Jalan Lingkungan					
Struktur jalan	Pekerjaan	17,153	9,488	0,300	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	21,562	3,8314	0,336	Ada keterkaitan
	Penghasilan	6,551	3,8314	0,185	Ada keterkaitan
Air Bersih					
Kebutuhan air bersih	Penghasilan	4,389	3,8314	0,152	Ada keterkaitan
Air Limbah					
Ketersediaan WC	Pekerjaan	12,108	9,488	0,252	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	90,350	3,8314	0,688	Ada keterkaitan
Ketersediaan septic tank	Pekerjaan	13,425	9,488	0,265	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	74,854	3,8314	0,626	Ada keterkaitan
Drainase					
Ketersediaan drainase	Pendidikan terakhir	11,723	9,488	0,248	Ada keterkaitan
	Pekerjaan	20,156	9,488	0,325	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	88,414	3,8314	0,680	Ada keterkaitan
Persampahan					
Ketersediaan kotak sampah	Pekerjaan	12,464	9,488	0,255	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	93,506	3,8314	0,700	Ada keterkaitan
Ketersediaan gerobak sampah	Pendidikan terakhir	32,572	9,488	0,413	Ada keterkaitan
	Pekerjaan	17,487	9,488	0,306	Ada keterkaitan
	Penghasilan	10,770	3,8314	0,273	Ada keterkaitan
Cara masyarakat membuang	Pendidikan terakhir	44,267	21,026	0,481	Ada keterkaitan
	Pekerjaan	32,027	21,026	0,409	Ada keterkaitan
	Kondisi bangunan rumah	14,329	7,814	0,274	Ada keterkaitan

Sub Variabel	Karakteristik Permukiman Kumuh	Pearson Chi-Square	Chi-Square Tabel	Cramer's V	Keterangan
sampah	Penghasilan	9,194	7,814	0,219	Ada keterkaitan

Sumber : Hasil Peneliti, 2019

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya yaitu mengetahui keterkaitan karakteristik permukiman kumuh dengan penyediaan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Kangkung. Karakteristik masyarakat di Permukiman Kumuh Kelurahan Kangkung adalah sebagian besar bangunan rumah masyarakat permanen dengan status rumah milik sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan mayoritas pekerjaan buruh dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 per bulan. Sedangkan dari penyediaan infrastruktur lingkungan yang dominan mengalami permasalahan di setiap RT adalah infrastruktur air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Permasalahan tersebut dikarenakan minimnya infrastruktur yang tersedia sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam infrastruktur yang berdampak pencemaran lingkungan yang menjadikan Kelurahan Kangkung menjadi permukiman kumuh.

Pada penyediaan infrastruktur lingkungan ada keterkaitan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi salah satu penyebab permasalahan infrastruktur lingkungan. Penghasilan sangat mempengaruhi dalam ketersediaan infrastruktur lingkungan seperti kebutuhan air bersih dan persampahan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya membuat masyarakat tidak menyesuaikan dengan SPM yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan tingkat penghasilan masyarakat yang masih cukup rendah sehingga segala permasalahan terjadi tanpa adanya penanganan dalam hal perekonomian. Hal tersebut juga diperkuat dengan tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang masih cukup rendah dengan sebagian besar lulusan SD sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat

terhadap kesadaran dalam pentingnya menjaga lingkungan untuk menjadikan lingkungan yang layak huni. Kesadaran masyarakat tersebut perlu ditingkatkan dengan meningkatkan SDM masyarakat dalam hal pendidikan sehingga mempunyai *skill* yang dapat mengentaskan permukiman kumuh di Kelurahan Kangkung dari adanya keterbatasan infrastruktur yang tersedia.

4.2 Rekomendasi

- a. **Rekomendasi untuk pemerintah** : perlu ditingkatkan perekonomian masyarakat sehingga penghasilan setara dengan UMK Bandarlampung untuk memenuhi kebutuhan yang mengalami kendala biaya dengan cara meningkatkan SDM masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan baru.
- b. **Rekomendasi untuk masyarakat**: perlunya kesadaran dan pola pikir untuk kepedulian kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti jangan membuang sampah ke laut dan buang air besar ke laut. Selain itu peningkatan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan ekonomi lokal makanan berbahan dasar ikan laut untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan Kelurahan Kangkung agar permukiman menjadi layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). *Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.543/KPTS/M/2001 tentang Standar Pelayanan Minimum Permukiman
- Kipraswil, K. M. (2002). *Keputusan Menteri Kipraswil Nomor 403/KTSP/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Bo.14/PRT/M/2014 tentang *Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang*
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Direktorat Pengembangan Kawasan
Pemukiman tentang *Panduan Pendampingan
Penyusunan Raperda tentang Pencegahan*

*dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh*
Komarudin. (1997). *Menelusuri
Pembangunan Perumahan dan
Permukiman : Yayasan Realestate
Indonesia*. Jakarta: PT. Rakasindo.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang *Perumahan dan Kawasan
Permukiman*